

Judul : Biar nggak jadi komoditas politik, RUU Desa dibahas usai pemilu
Tanggal : Jumat, 19 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Biar Nggak Jadi Komoditas Politik

RUU Desa Dibahas Usai Pemilu

Pimpinan DPR diminta menjelaskan nasib revisi Undang-Undang (UU) Desa dan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Publik mesti mengetahui bahwa tidak ada hal-hal yang menghambat revisi UU Desa ini.

ANGGOTA Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, di berbagai kunjungan kerja ke daerah, dirinya mendapat banyak pertanyaan soal kelanjutan revisi tersebut.

"Saya banyak mengunjungi desa-desa, tentu dalam menjelang pemilu ini. Nah satu hal yang ditanya, bagaimana kelanjutan Undang-Undang Desa yang sudah diputuskan dalam Paripurna DPR," katanya dalam interupsinya dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parle-

men, Jakarta, kemarin.

Dia menilai, penjelasan Pimpinan DPR ini diperlukan agar publik dapat mengetahui bahwa sesungguhnya tidak ada hal-hal yang menghambat revisi UU Desa ini. Apalagi, para kepala desa juga sampai hari ini belum mendapatkan kepastian terkait dengan tuntutannya tersebut.

"Oleh karena itu, saya mohon kepada pimpinan dapat menjelaskan terkait dengan keberlanjutan (revisi) Undang-Undang Desa tersebut," ujarnya.



Herman Khaeron

Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta kejelasan atas RUU BUMN yang juga telah disepakati sebagai RUU usul inisiatif DPR. RUU ini menjadi pertanyaan di Komisi VI DPR, lantaran, sejak diputuskan sebagai RUU usul

inisiatif DPR RUU BUMN sampai hari ini belum ada kejelasan.

"Kami sudah membahas berbulan-bulan dan tentu hal-hal yang penting untuk kemajuan bangsa dan negara dalam perspektif BUMN, kami sudah rumuskan betul di sana. Namun sampai hari ini belum ada kabar beritanya," katanya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahma mengatakan, Pimpinan DPR memang tidak memasukkan pembahasan revisi UU Desa dalam masa sidang kali ini. Keputusan tersebut diambil agar revisi UU Desa ini tidak menjadi komoditas politik di tahun pemilu ini.

"Kita tidak mau revisi Undang-Undang Desa itu kemudian diuntungkan kepada satu atau dua parpol saja di parlemen," katanya.

Namun demikian, dia memberi kesempatan kepada para organisasi kepala desa untuk bersilaturahmi ke seluruh fraksi-fraksi di DPR untuk meyakinkan bahwa UU Desa ini memang perlu direvisi dan bermanfaat untuk para kepala desa dan rakyat banyak.

"Olehnya itu, dalam masa sidang yang pendek ini, kami mempersilakan fraksi-fraksi di DPR untuk membuka pintu kepada organisasi-organisasi kepala desa bersilaturahmi. Agar revisi ini bisa berjalan dengan lancar di DPR," jelasnya.

Sementara terkait RUU BUMN, Dasco memastikan akan dibahas dalam rapat Pimpinan DPR bersama para ketua-ketua fraksi. "Nanti akan disampaikan di situ," tambahnya. ■ KAL